DINAMIKA SOSIAL EKONOMI DAN PEMANFAATAN RUANG JABODETABEK[1]

Oleh:
Tim Studi Jabotabek, Fakultas Pertanian[2]

Paradigma pembangunan nasional yang hampir lebih dari 32 tahun menganut prinsip pembangunan terpusat dan cenderung "bias kota" menyebabkan hampir seluruh dinamika nasional terpusat di Jakarta. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah menjadi kota terdinamis di Indonesia. Hegemoninya telah mempengaruhi perkembangan daerah sekitarnya antara lain Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Interaksi diantara kelima kawasan tersebut berlangsung secara aktif, sebagaimana layaknya sebuah sel hidup dengan organel-organelnya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Rustiadi dan Panuju (2000) diketahui bahwa penduduk Bogor (termasuk Depok), Tangerang, dan Bekasi pada tahun 1991 yang bekerja di Jakarta adalah masing-masing 47.82%, 55.46%, dan 50.83%. Pada tahun yang sama aktifitas bersekolah dari ketiga kota satelit ke Jakarta secara berurutan adalah 52.09%, 38.46%, dan 48.75%. Perjalanan para penglaju yang mencapai 3 juta jiwa ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas pada setiap pintu masuk Jakarta.

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dengan Puncak dan Cianjur (Jabode tabekpunjur) merupakan salah satu contoh kawasan yang direncanakan ditata secara formal melalui KEPPRES. Rancangan ini didasarkan pada suatu kesadaran akan fakta bahwa Jabodetabekpunjur merupakan satu sistem yang utuh yang setiap dinamika komponennya mempengaruhi dinamika komponen yang lain. Hubungan fungsional ekologis-ekonomis antar wilayah tersebut sulit untuk dipisahkan secara tegas. Geliat perekonomian di wilayah Bodetabekpunjur dipengaruhi oleh geliat ekonomi Jakarta. Di sisi lain, geliat aktifitas yang mempengaruhi kondisi ekologis Bodetabekpunjur akan mempengaruhi kondisi Jakarta.

Pada tulisan ini akan ditunjukkan betapa dinamika sosial ekonomi dan politik yang berkembang di Jakarta telah memberi dampak cukup besar terhadap dinamika pemanfaatan ruang di Jabodetabek.

Dinamika Sosial Ekonomi Jabodetabek

Berdasarkan pada pemahaman wilayah Jabodetabek sebagai satu kesatuan sistem, maka perlu dilihat dinamika yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan asumsi bahwa Jakarta menjadi nucleus dari sistem sel Jabodetabek dan Bodetabek sebagai organel-organelnya, maka akan dibandingkan kondisi sosial ekonomi di Jakarta dan di Bodetabek. Sebagai gambaran pertama adalah perkembangan penduduk di wilayah Jakarta dan Botabek. Kondisi pertumbuhan penduduk di Jabotabek ditunjukkan pada Gambar 1.

Pada Gambar 1a) terlihat bagaimana pertumbuhan penduduk di setiap wilayah Kota Jakarta tahun 1980, 1990 dan 2000. Gambar tersebut menunjukkan adanya penurunan kepadatan penduduk di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sementara Jakarta Utara, Barat dan Timr yang notabene merupakan lokasi pusat-pusat industri manufaktur di Jakarta cenderung terus meningkat.

Gambar 1b) menunjukkan persentase jumlah penduduk Jakarta, Botabek dan Jabotabek terhadap penduduk Indonesia. Terlihat bahwa dari tahun dalam setiap 10 tahun dari tahun 1961 sampai dengan 2000 persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Jabotabek meningkat dari 6% di tahun 1961 menjadi 11% pada tahun 2000. Dari total Jabodetabek tersebut peningkatan

---

[1] Disampaikan pada Seminar Terbatas "Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Masalah Lingkungan. Bogor, 29 Januari 2004

[2] D.R. Panuju, E. Rustiadi, D. Shiddiq, B.H. Trisasongko, J.T. Hidayat, D. Radnawati dan A.F.M. Zain, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
Phone: 0251-422322

penduduk yang cukup besar terjadi di wilayah Botabek, yaitu dari 1961 sebesar 3% menjadi ± 6% pada tahun 2000. Sementara itu yang tinggal di Jakarta dari sebesar ± 5% pada tahun 2000.

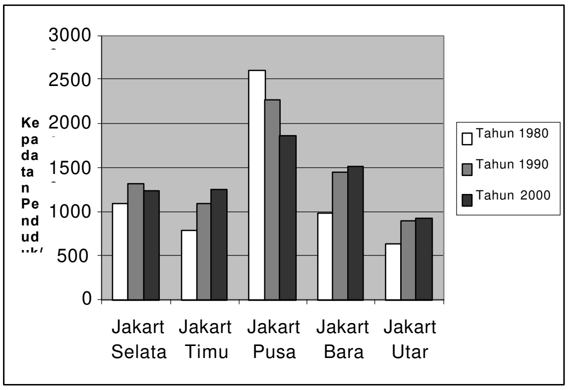

a) Kepadatan Penduduk Jakarta

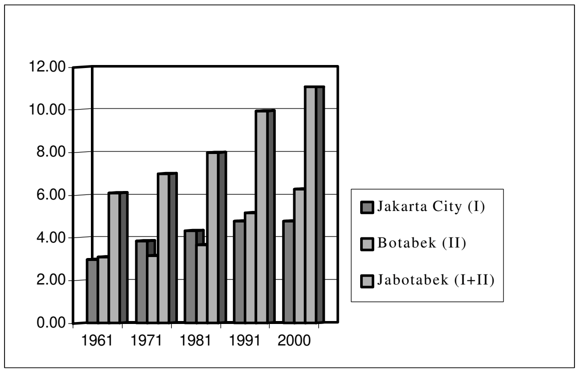

b) Persentase Penduduk Jabodetabek

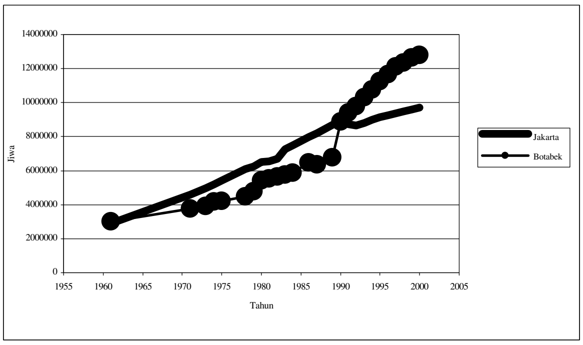

c) Jumlah Penduduk Jabodetabek

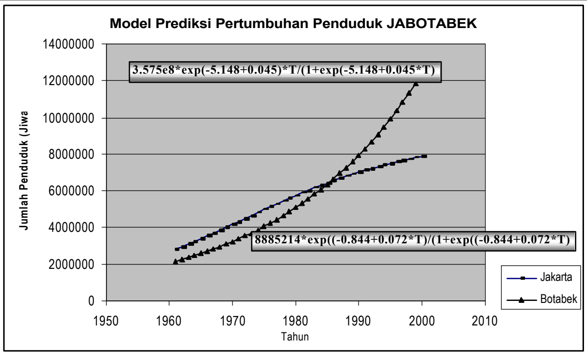

d) Prediksi Pertumbuhan Penduduk Jabodetabek

Sumber: Rustiadi et al., 2002; Rustiadi et al, 2003

Gambar 1. Pertumbuhan Penduduk di Wilayah Jabodetabek

Gambar 1c) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Botabek tahun 1990 telah melampaui jumlah penduduk Jakarta. Selanjutnya dengan data pertumbuhan penduduk dari tahun 1960 hingga 2000 diprediksi pertumbuhan penduduk Jakarta dan Botabek akan mengikuti persamaan *saturation* pada Gambar 1d). Gambar 1d) tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jakarta telah mencapai titik jenuhnya.

Selanjutnya untuk dapat menganalisis lebih lengkap kondisi Jakarta dan Bodetabek perlu dilihat bagaimana kecenderungan migrasi yang terjadi di Jakarta dan Botabek. Gambaran tentang kondisi migrasi ke Jakarta ini akan semakin melengkapi informasi tentang fakta kondisi demografis Jakarta dan Bodetabek. Secara visual gambaran migrasi ke Jakarta serta angkatan kerja yang mencari kerja di Jakarta disampaikan dalam Gambar 2.

Gambar 2a) menunjukkan kecenderungan jumlah migrasi di setiap sub wilayah di Jakarta tahun 1975 hingga 1994. Sementara Gambar 2b) menunjukkan selisih migrasi masuk dan keluar di Jakarta. Secara jelas ditunjukkan dalam Gambar 2b) bahwa migrasi bersih ke Jakarta telah mengalami laju negatif sejak 1990. Gambar 2a dan 2b menjadi salah satu indikator terjadinya proses suburbanisasi di wilayah Jakarta. Perpindahan penduduk Jakarta ke wilayah pinggiran (suburban) Jakarta dilakukan terutama oleh kaum *middle class*.

Selanjutnya Gambar 2c) menunjukkan prediksi kecenderungan pertumbuhan angkatan kerja di Jakarta tahun berdasarkan data tahun 1978 hingga 2002. Angkatan kerja yang dimaksud termasuk angkatan kerja migran dan non migran. Pola pertumbuhan angkatan kerja itu pun cenderung berpola jenuh. Hingga tahun 2002 pertumbuhan angkatan kerja cenderung masih tinggi. Gambar 2d) melengkapi informasi sektor kerja migran di Jakarta. Dari Gambar 2d) terlihat bahwa jumlah migran yang bekerja di sektor informal jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di sektor formal. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa migran ke Jakarta didominasi oleh pencari kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah.

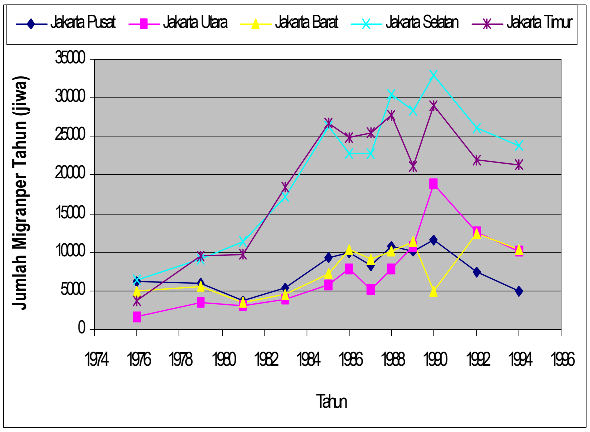

a) Migrasi ke Jakarta

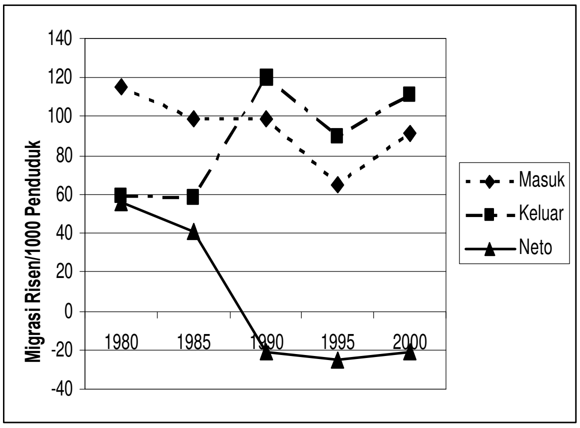

b) Migrasi Risen di Jakarta

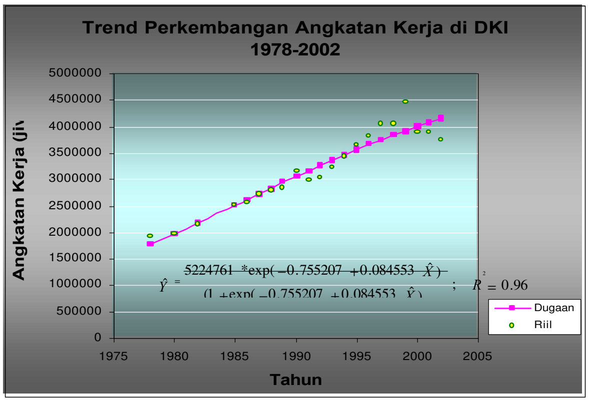

c) Prediksi Trend Angkatan Kerja di Jakarta

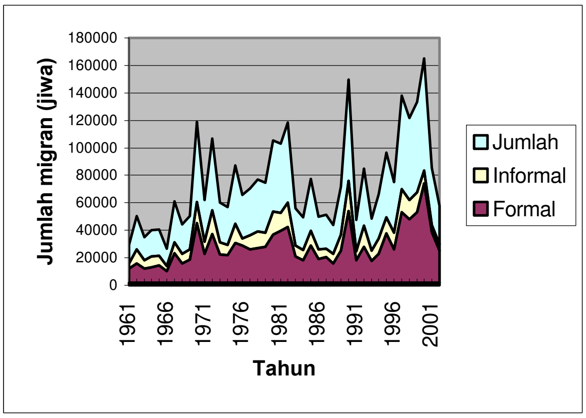

d) Sektor Kerja Migran di Jakarta

Sumber: Rustiadi dan Panuju, 2000; Rustiadi et al., 2003; Joewono, 2003.

Gambar 2. Pola Migrasi dan Angkatan Kerja di Jakarta

Meneliti lebih dalam lagi tentang asal migran ke Jakarta berikut akan ditunjukkan hasil penelitian Joewono (2002) yang menunjukkan bahwa asal migran ke Jakarta dapat dibagi atas migran Botabek dan migran luar Bodetabek. Dengan membagi wilayah Bodetabek menjadi 3 Zone, maka dapat ditunjukkan asal migran ke Jakarta secara rinci sebagaimana disampaikan pada Tabel 1.

Zone-1 merupakan zone berpenduduk terpadat dengan infrastruktur utama yang terbaik, infrastruktur sekunder paling baik dan akses terbaik pula. Wilayah yang tercakup adalah desa-desa utama wilayah Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Depok, dan Kota Bogor. Zone-2 adalah zone dengan penduduk relatif padat tetapi tidak sepadat Zone-1, infrastruktur masih relatif baik, infrastruktur relatif baik dan akses cukup baik. Sedangkan Zone-3 adalah zone yang mencakup wilayah dengan tingkat kepadatan rendah, infrastruktur kurang baik, serta akses kurang baik.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari total sampel sejumlah 1.559.326 jiwa, 91% migran di Jakarta berasal dari wilayah luar Botabek. Sementara itu, wilayah Zone menarik 49,7% migran dari luar Botabek, Zone-2 menarik 52,7% migran dari luar Botabek dan Zone-3 menarik minat 31,9% migran dari luar Botabek. Penduduk Jakarta yang cenderung berpindah menuju tiga Zone tersebut, juga cukup besar. Dari contoh yang diambil, migran yang saat ini tinggal di Zone-1, 41% merupakan penduduk yang sebelumnya tinggal di Jakarta. Migran yang saat ini tinggal di Zone-2, 43% berasal dari Jakarta. Sedangkan migran yang saat ini tinggal di Zone-3, 51,7% berasal dari Jakarta.

Fenomena yang menarik dari hasil kajian tersebut adalah bahwa migrasi perpindahan tempat tinggal dari Jakarta ke wilayah Bodetabek yang memunculkan fenomena suburbanisasi. Suburbanisasi tersebut terjadi secara kurang tertata matang, terbukti dengan pelaku migran yang ternyata masih bekerja di Jakarta, sehingga memunculkan fenomena kemacetan di setiap pintu masuk menuju Jakarta. Disamping itu, suburbanisasi tersebut meningkatkan konsumsi sarana transportasi, enerji dan waktu tempuh per kapita, serta memperburuk mobilisasi sumberdaya. Berdasarkan kajian lebih rinci dari Joewono (2003), terlihat bahwa pelaku outmigran Jakarta ke Bodetabek tersebut memiliki tingkat penghasilan strata menengah ke atas dan merupakan penduduk usia produktif.

Tabel 1. Pola Migrasi ke Jakarta dan Tiga Zone di Bodetabek

Daerah Asal	Tempat Tinggal Sekarang				Absolut
	Jakarta	Zone-1	Zone-2	Zone-3	
Jakarta	-	**41,6**	**43,0**	**51,7**	409 481
Zone-1	4,6	-	4,1	3,1	41 098
Zone-2	2,7	7,0	-	**13,3**	64 520
Zone-3	1,6	1,7	0,3	-	20 976
Luar Zone	**91,1**	**49,7**	**52,7**	**31,9**	1 023 251
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	1 559 326
Absolut	594 542	620 168	306 611	38 005	

Sumber: Joewono, 2003

Selanjutnya pertumbuhan struktur perekonomian di wilayah Jabotabek khususnya 3 sektor penting yaitu sektor pertanian, industri dan jasa formal disampaikan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian di Jabodetabek 1990-2000

Wilayah	Pertumbuhan										Rata-rata
	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	90-00
Jakarta Selatan	18.29	-6.95	-7.37	-13.66	-4.80	-3.48	-11.93	-8.40	8.06	4.04	-2.62
Jakarta timur	-8.35	-24.02	-11.87	-11.91	-0.54	-1.46	-17.00	-9.01	0.02	-3.15	-8.73
Jakarta Pusat	13.51	-20.76	-17.60	-1.50	-7.28	-0.30	-0.15	16.81	3.15	-0.95	-1.51
Jakarta barat	-0.51	-16.48	1.70	-9.81	-5.75	1.91	38.60	-27.03	5.63	-3.46	-1.52
Jakarta Utara	3.42	-4.74	4.86	-13.22	-1.14	-1.19	0.49	8.12	7.63	-8.25	-0.40
Kota Bogor											
Kabupaten Bogor	4.12	8.91	0.46	2.81	3.79	7.42	-11.23	-22.57	-4.44	0.14	-1.06
Kota Bekasi								-8.42	11.49	-3.44	-0.12
Kabupaten Bekasi	-1.66	8.03	2.55	-15.81	-10.05	-1.45	-17.22	-8.44	-1.04	3.59	-4.15
Kota Tangerang				-30.49	2.14	-8.54	-15.94	-12.69	-0.45	-3.13	-9.87
Kabupaten Tangerang	-0.09	-8.75	3.09	0.85	7.59	8.56	-5.14	-15.46	6.70	-65.89	-6.86
Kota Depok										1.86	1.86

Sumber: Rustiadi et al, 2003.

Tabel 2 menunjukkan kecenderungan pertumbuhan sektor pertanian dari tahun 1990 sampai dengan 2000. Secara rata-rata di seluruh wilayah di Jabodetabek pertumbuhan sektor pertanian terus mengalami penurunan. Kabupaten Bekasi dan Tangerang yang menjadi salah satu pusat sawah beririgasi teknis di Pantura pun memiliki pertumbuhan sektor pertanian yang terus menurun. Dapat dinyatakan bahwa sektor pertanian bukan primadona dan bukan sektor yang diminati sebagai aktifitas ekonomi masyarakat bagi penduduk di wilayah Jabotabek.

Tabel 3. **Pertumbuhan PDRB Sektor Industri di Jabodetabek 1990-2000**

Wilayah	Pertumbuhan										Rata-rata
	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	90-00
Jakarta Selatan	8.30	10.71	10.32	20.64	17.33	22.16	2.83	3.54	0.04	2.60	9.85
Jakarta timur	4.42	6.83	7.50	8.79	9.09	6.36	5.26	-16.77	-4.87	3.79	3.04
Jakarta Pusat	7.98	10.74	11.86	-14.90	38.14	-15.68	25.45	-22.95	-7.87	-1.06	3.17
Jakarta barat	5.29	10.28	18.00	10.85	11.96	5.49	24.00	-9.24	-4.79	5.49	7.73
Jakarta Utara	3.94	6.34	5.05	7.35	9.60	10.43	4.31	-19.53	0.29	3.17	3.10
Kota Bogor											
Kabupaten Bogor	12.82	9.37	5.80	17.02	14.29	13.97	8.41	-21.12	-8.53	-90.62	-3.86
Kota Bekasi								-19.61	-9.54	4.82	-8.11
Kabupaten Bekasi	22.75	57.67	25.12	16.83	16.45	11.94	8.27	-24.41	2.27	6.32	14.32
Kota Tangerang				25.42	24.18	22.72	17.19	-13.81	2.20	5.26	11.88
Kabupaten Tangerang	13.73	-54.90	13.73	18.06	160.95	13.71	7.66	-2.90	2.18	2.33	17.45
Kota Depok										2.73	2.73

Sumber: Rustiadi et al, 2003

Pertumbuhan sektor industri juga cenderung berlawanan dengan sektor pertanian. Secara rata-rata laju pertumbuhan sektor industri positif (terus meningkat) di seluruh wilayah di Jabodetabek kecuali wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Namun jika diamati satu per satu terlihat bahwa kecenderungan dari tahun ke tahun, awal krisis yang terjadi pada tahun 1997 telah memberikan dampak penurunan laju pertumbuhan produk masyarakat di sektor industri. Kecepatan untuk pulih berbeda antar wilayah, karena perbedaan kebijakan di setiap wilayah. Penurunan yang sangat besar di Kabupaten Bogor berkaitan erat dengan perubahan batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Tabel 4. **Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Formal di Jabodetabek 1990-2000**

Wilayah	Pertumbuhan										Rata-rata
	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	90-00
Jakarta Selatan	11.97	9.31	13.25	9.66	11.09	11.24	5.19	-25.10	1.45	4.06	5.21
Jakarta timur	9.14	10.61	11.15	9.17	9.86	10.27	0.80	-14.23	0.83	4.13	5.17
Jakarta Pusat	7.76	7.56	7.28	10.02	9.66	9.03	4.04	-10.38	-0.16	-19.25	2.56
Jakarta barat	8.81	6.09	11.78	8.65	8.90	10.01	3.99	-23.69	0.13	4.05	3.87
Jakarta Utara	38.36	7.12	6.36	9.80	10.18	-7.53	31.25	-17.55	1.17	3.97	8.31
Kota Bogor											
Kabupaten Bogor	9.12	7.32	-29.78	10.01	7.85	11.88	5.51	-22.85	-32.14	-10.55	-4.36
Kota Bekasi								-24.89	18.54	7.28	0.31
Kabupaten Bekasi	9.02	24.28	12.51	15.85	15.00	16.30	8.18	-17.65	3.07	4.48	9.10
Kota Tangerang				13.94	12.65	13.48	5.15	-22.82	5.44	2.42	4.32
Kabupaten Tangerang	7.18	-66.71	9.73	5.31	11.56	6.70	7.90	-19.16	0.60	9.27	-2.76
Kota Depok										3.61	3.61

Sumber: Rustiadi et al, 2003

Tabel 4 menunjukkan pertumbuhan produk masyarakat di sektor jasa formal. Kondisi pertumbuhan sektor jasa formal ini juga cenderung sama dengan pertumbuhan sektor industri.

Penurunan drastis terjadi pada awal krisis ekonomi 1997. Terlihat lagi bahwa Kabupaten Bogor memiliki kecepatan pemulihan yang relatif lambat dibandingkan dengan wilayah lain. Pada saat wilayah lain mulai pulih pertumbuhan sektor jasa formalnya, Kabupaten Bogor justru makin terpuruk pada tahun 1997-1998. Yang memiliki fenomena agak janggal juga Jakarta Pusat yang justru menjadi pusat aktifitas jasa formal. Sampai dengan 1999-2000 kondisi pertumbuhan jasa formalnya juga masih negatif. Artinya secara relatif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum periode krisis 1997 pertumbuhan jasa formal di Jakarta Pusat pada periode 1997 justru makin buruk.

Dinamika Pemanfaatan Ruang Jabodetabek

Sebelum memahami pola pemanfaatan ruang Jabotabek akan ditunjukkan pola spasial persebaran penduduk di wilayah Jabodetabek tahun 1992 dan 2001. Pola sebaran penduduk ini akan disandingkan dengan derajat konversi lahan untuk melihat adanya atau tidaknya keterkaitan langsung secara visual antara pola spasial sebaran penduduk dengan pola spasial konversi lahan. Pola pemanfaatan ruang Jabotabek mengalami dinamika yang cukup pesat seiring dengan dinamika penduduk dan aktifitas masyarakat di wilayah tersebut. Dalam hal ini lahan pertanian selalu menjadi jenis lahan yang paling banyak mengalami konversi. Berdasarkan kajian tentang pola penutupan lahan di Jabodetabek data tahun 1972-2001 dapat dilihat kebutuhan ruang untuk pemenuhan sarana permukiman dan fasilitas meningkat cukup pesat dengan sebaran sebagaimana disampaikan pada Gambar 3.

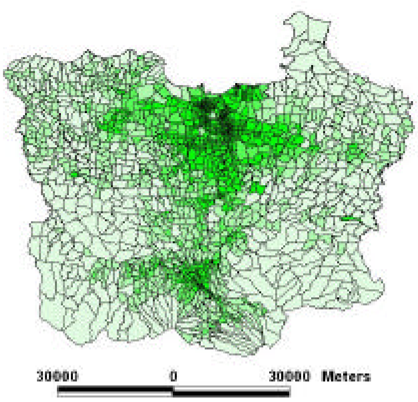

1992

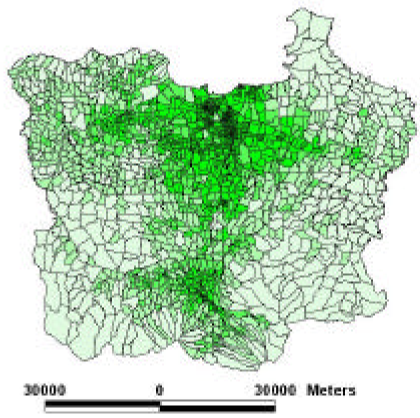

2000

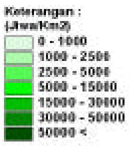

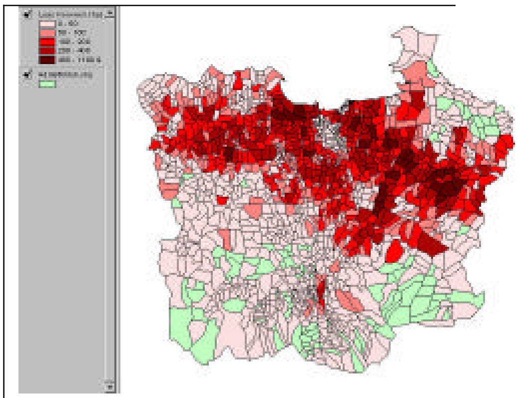

Derajat Luas Konversi per Desa

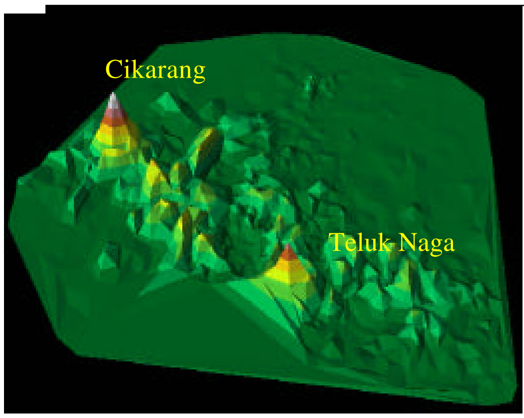

Tampilan 3D Derajat Konversi Lahan

Sumber: Rustiadi et al, 2002.

Gambar 3. Sebaran Kepadatan Penduduk dan Derajat Perubahan Penutupan Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Jabodetabek

Dari tampilan Gambar 3 terlihat bahwa pertumbuhan penduduk tahun 1992 dan 2000 perubahan relatif kecil, sedangkan konversi lahan dilihat dari data penutupan lahan Bodetabek 1972-2001 secara spasial lebih banyak terjadi di sekitar wilayah Tangerang dan Bekasi. Konversi tertinggi terjadi di Kecamatan Cikarang untuk yang ke arah Timur (Bekasi) dan Kecamatan Teluk Naga untuk yang ke arah Barat (antara Jakarta dan Tangerang). Pembangunan Lippo Cikarang dan kawasan industri Jababeka merupakan proses konversi lahan pertanian paling intensif di seluruh wilayah Jabodetabek. Memperhatikan pola perubahan penggunaan lahan tersebut mungkin tidak ada sesuatu informasi baru bagi kita tentang proses perubahan penggunaan lahan di Jabodetabek. Namun jika dicoba mengkaitkan rencana penataan ruang dan kondisi riil penggunaan lahan akan terlihat ada yang perlu dicermati tentang pemanfaatan ruang di wilayah Jabodetabek ini.

Dari kajian yang sudah dilakukan tentang penataan ruang di wilayah Jabodetabek dapat dilihat sumber dan keluaran rencana penataan ruang diwilayah Jabodetabek sebagaimana disampaikan pada Gambar 4.

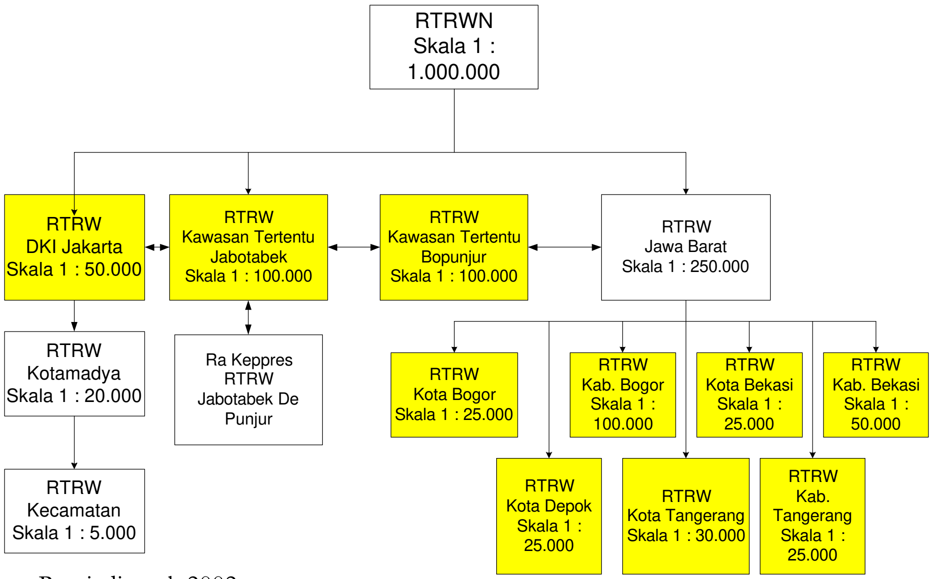

Sumber: Rustiadi et al, 2002.

Gambar 4. Bagan Rencana Tata Ruang di Jabodetabekpunjur

Bagan tersebut menunjukkan bahwa rencana penataan ruang di wilayah Jabodetabekpunjur dan output yang dihasilkan tersebut menunjukkan tingkat kedetilan informasi yang akan dihasilkan dari setiap proses perencanaan. Untuk wilayah Jabodetabek saja, dapat dilihat bahwa tidak ada keseragaman skala yang dihasilkan dari output perencanaan untuk tingkat pemerintahan yang sama. Tentu saja skala yang lebih besar memiliki tingkat kedetilan informasi yang lebih besar pula. Dalam hal ini Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan output perencanaan yang paling kurang-detil. Artinya alokasi ruang yang paling kurang akurat dan memiliki peluang meleset paling besar adalah rencana tata ruang di wilayah Kabupaten Bogor.

Selanjutnya untuk melihat konsistensi terminologi menurut berbagai produk rencana penataan ruang di wilayah Jabodetabekpunjur akan disampaikan matriks terminologi klasifikasi pemanfaatan ruang di berbagai wilayah kota dan kabupaten tersebut. Sebagai acuan pembanding pembangun matriks tersebut adalah terminologi dalam UU penataan ruang no 24/1992 dan Peraturan Pemerintah no 10 tahun 2000. Upaya pemahaman konsistensi terminologi menjadi salah satu indikator pemahaman dan penterjemahan undang-undang dan peraturan pemerintah di wilayah kabupaten dan kota. Konsistensi terminologi tersebut disampaikan pada Tabel 5.

Tabel 5.

UUTR No. 24/92	PP No. 10 Tahun 2000	Perda No. 6/1999 RTRW DKI 2010	RBWK DKI 2005	RTRW Kodya Bogor 1999-2009	RTRW Kab. Bogor 2000-2010	RTRW Kota Depok 2000-2010	RTRW Kodya Tangerang 1994-2010	RTRW Kab. Tangerang 1996-2010	RTRW Kab. Bekasi 1993-2003	RTRW Kodya Bekasi 2000-2010	RTRW Kawasan Bopunjur
I. Lindung	a. Kaw. Lindung/resapan air		Sungai/Kali/waduk	Sungai/Danau/Situ	Sungai/Danau/Situ	Sungai/Danau/Situ	Sungai/Danau/Situ		Sungai/Danau/Situ	Sungai	Kaw. Perlindungan Setempat
					Kaw. Hutan Lindung		Kaw. Pengemb Terbatas		Kaw. Hutan Lindung		Kaw. Hutan Lindung
					Renc. Waduk						
	b. Kaw. Terbuka hijau, Sempadan	Ruang Terbuka Hijau	Kaw Hijau tanpa bangunan	Hutan		Hutan Kota	Taman/Jalan		Kaw. Jalur Hijau	Taman/Hutan Kota	
										Rekreasi Olah Raga	
										Jalur Hijau	
				Taman/OR/Jalur hijau					Pemakaman Umum	Pemakaman Umum	
	c. Kaw. Suaka Alam										Kaw. Cagar Alam
											Taman Wisata Alam
	d. Kaw. Pelestarian Alam										Kaw. Taman Nasional
	e. Kaw. Cagar Budaya										
	f. Kaw. Rawan Bencana										
	g. Kaw. Pantai bakau/Plasma Nuftah			Kebun Raya				Hutan Bakau			
II. Budidaya	a. Kaw. Hutan Produksi				Kaw. Hutan Produksi						
					Kaw. Perkebunan						
	b. Kaw. Hutan Rakyat										
	c. Kaw. Pertanian				Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering		Pengemb Tan Lhn Basah	Pertanian Lahan Basah	Pertanian	Kawasan Lahan Basah
					Peranian Lahan Basah	Pertanian Lahan Basah		Sawah Wisata	Pertanian lahan kering		Kawasan lainnya
					Pert. Tanaman Tahunan			Perikanan/Tambak	Pertanian Tanaman Tahun		
								Tambak dan wisata pantai	Perikanan/Tambak		
	d. Kaw. Pertambangan				Kaw. Pertambangan				Galian C		
	e. Kaw. Industri	Industri dan Pergudangan	Campuran industri/Bangunan umum		Kaw. Peruntukan Industri	Industri	Kawasan Industri	Industri Eksisting	Industri	Industri	
			Industri Pergudangan KDB rendah					Potensi Industri & Gudang	Kaw. Industri		
			Industri Pergudangan						Industri Eksisting		
									Zona Industri		
	f. Kaw. Pariwisata				Kaw. Pariwisata			Pariwisata	Pariwisata		
								Kaw. Pariwisata			
								Kaw. Wisata			
								Taman Wisata			
	g. Kaw. Permukiman	Perumahan rendah	Perumahan KDB rendah	Perumahan KDB rendah	Kaw. Pengemb Perkotaan	Perumahan KDB rendah	Kawasan Perumahan	Perumahan Perkotaan	Pengemb Permukiman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Kawasan Permukiman
		Perumahan kepadatan rendah	Perumahan dan fasilitas umum	Permukiman	Kaw. Permukim Perdesaan	Perumahan KDB tinggi	Kawasan Pusat Kota	Perumahan Terbatas	Perumahan Eksisting	Perumahan Kepadatan sedang	Kawasan Lainnya
		Bangunan umum	Camp. Perumahan/ Bangunan umum	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Kawasan Bandara	Pengemb Kaw Baru	Pemerintahan/Pelayanan	Perumahan Kepadatan rendah	
		Bang. Umum & perumahan	Camp. Perumahan/ Industri	Pemerintahan		Fasilitas Umum	Jalan Tol	Pengemb Kota Kecamatan	Campuran Komersial	Pemerintah dan bangunan umum	
		Bang. Umum kepadatan rendah	Jasa/Komersial/Perkantoran	Pasar		Perdagangan/Jasa		Perdagangan dan Jasa	PLTGU	Perdagangan dan Jasa	
			Fasilitas Umum	Fasilitas sosial		Pusat Pelayanan		Lapangan Terbang		Pendidikan	
			Pemerintahan	Rumah Sakit		Kaw. Pendidikan		Pelita Air Service		Kesehatan/Rumah sakit	
			Bangunan Umum KDB rendah	Terminal		RRI		Puspitek		Stasiun Kereta Api	
				Rumah Potong Hewan		TVRI				TPA Sampah	
				Perda Batas Kota		UI					

Tabel 5 tersebut memperkuat inkonsistensi output rencana tata ruang antar wilayah di Jabodetabekpunjur. Artinya tidak hanya dari skala output yang dihasilkan yang cenderung tidak konsisten, tetapi juga terminologi penggunaan lahan di setiap wilayah yang tentunya akan berimplikasi pada output rencana detilnya pun cenderung berbeda-beda antar wilayah.

Selanjutnya, dari alokasi ruang yang digunakan untuk kawasan lindung dan budidaya di wilayah Jabodetabek terlihat bahwa telah terjadi inkonsistensi pula dalam pemanfaatan ruang secara riil di wilayah Jabodetabekpunjur. Penetapan rencana alokasi lahan untuk berbagai penggunaan cenderung kurang sesuai dengan kondisi riil yang ada. Inkonsistensi ini ditunjukkan pada Tabel 6, sedangkan sebaran spasialnya disampaikan pada Gambar 5.

Tabel 6. Persentase Alokasi Lahan dalam RTRW 2000 dan Kondisi Eksisting 2001 di Jabodetabek

Klasifikasi Umum Arahan Pemanfaatan Lahan	Arahan pemanfaatan Lahan menurut RTRW		Penutupan Lahan Eksisting				
			TPLK	R Terbangun	Hutan	TPLB	Badan Air
Kawasan	Kawasan Lindung/Resapan	5.68	13.42	57.43	0.33	18.63	10.19
Lindung	Kaw. Sempadan/Terbuka Hijau	6.46	27.32	50.64	0	21.35	0.68
Kawasan	Kawasan Industri	9.55	2.71	89.34	0	3.96	3.99
Budidaya	Kawasan Permukiman	71.04	11.45	80.19	0.05	6.63	1.68
	Jalan Tol	7.28	5.96	79.55	0.18	9.86	4.44
	Jumlah	100.00					

Sumber: Rustiadi et al, 2002.

Dari Tabel 6 yang menjadi kepedulian utama adalah penyimpangan di kawasan lindung. Kawasan lindung yang menjadi penopang stabilitas ekologi terbukti tidak sepenuhnya dipatuhi. Sebagai contoh kawasan lindung termasuk sempadan sungai, daerah resapan dan *mangrove* yang harus dilindungi sebagian sudah dirambah untuk pertanian serta permukiman dan lokasi prasarana. Permasalahannya adalah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidakkonsisten an tersebut, tergantung dari kemauan pemerintah daerah. Sejauhmana tindakan menyesuaikan kondisi eksisting dengan rencana tata ruang wilayah akan dapat dilakukan pemerintah setempat. Ada dua alternatif yang harus dipilih yang keduanya kelihatannya memberikan dampak positif dan negatif, yaitu (1) mengubah rencana penataan ruang yang ada disesuaikan dengan kondisi eksisting, atau (2) melakukan pembongkaran terhadap lokasi yang memang tidak dialokasikan untuk kawasan terbangun (*built-up area*) dan dikembalikan fungsinnya menjadi kawasan lindung. Jika pilihan pertama yang diambil, maka artinya fungsi ekologis dikalahkan oleh fungsi ekonomis. Sementara jika pilihan kedua yang diambil maka fungsi ekologis kawasan terselamatkan, namun ada pihak-pihak yang secara ekonomis dirugikan. Jawaban yang lebih baik baru dapat diberikan jika dilakukan valuasi terhadap seluruh komponen. Harus dapat dilakukan perhitungan seberapa besar kerugian yang akan muncul dari dampak ekologis jika pilihan 1 yang diambil, dan berapa besar kerugian ekonomis jika pilihan 2 yang diambil.

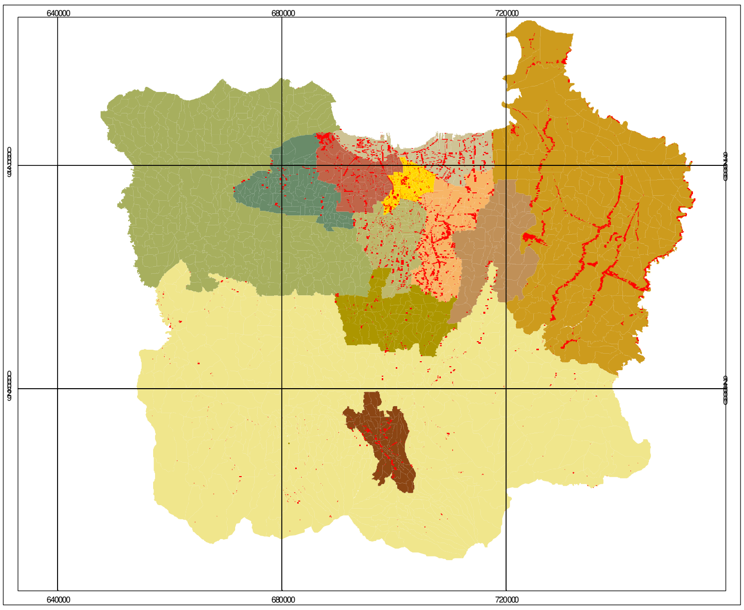

Sumber: Rustiadi et al., 2002.
Keterangan : Penyimpangan ditandai spot warna merah

Gambar 5. Penyimpangan Pemanfaatan Kawasan Lindung di Wilayah Jabodetabek

Penutup

Makalah ini disampaikan untuk menunjukkan beberapa fakta yang diketahui tentang dinamika sosial ekonomi di DKI Jakarta. Beberapa hal menarik yang dapat disarikan dari rangkaian fakta-fakta tersebut adalah:

- Proses suburbanisasi telah terjadi di Jabodetabek dan dipicu oleh arus migrasi yang cukup besar menuju Jakarta pada awalnya dan meluas ke arah Botabek pada fase berikutnya. Migran didominasi oleh pencari kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah yang kemudian memunculkan perkembangan sektor informal yang pesat di DKI Jakarta.
- Sektor pertanian bukan sektor yang diminati dan menjadi andalan bagi sebagian besar wilayah di Jabodetabek terbukti dengan kecenderungannya yang terus menurun dari tahun ke tahun. Tetapi pada masa krisis justru menjadi sektor yang tumbuh di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.
- Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang paling lambat dalam pemulihan setelah krisis ekonomi.
- Konversi lahan pertanian terbesar berpusat di wilayah Tangerang dan Bekasi yang justru merupakan bagian dari wilayah dengan infrastruktur pertanian terbaik di Indonesia.
- Sumber dan produk rencana tata ruang di Jabodetabek cenderung tidak seragam dalam skala dan terminologi yang akan berdampak pada perbedaan output antar wilayah.
- Produk rencana tata ruang Kabupaten Bogor berskala paling kasar dibandingkan dengan wilayah lain.
- Penyimpangan pemanfaatan kawasan lindung untuk penggunaan non pertanian terjadi di seluruh wilayah di Jabodetabek. Alokasi kawasan lindung yang hanya 0.6% dibandingkan dengan total wilayah Jabodetabek ternyata banyak dirambah.

Daftar Pustaka

Joewono, Djoko. 2003. Mobilitas Penduduk dalam Wilayah Jabotabek. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Rustiadi, E., Zain, AFM., Trisasongko, BH., Shiddiq, D., Panuju, DR., Hidayat, JT., dan Radnawati, D. 2002. Kajian Pemanfaatan Ruang Jabotabek. Kerjasama Badan Perencanaan Daerah Propinsi DKI Jakarta dengan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.

Rustiadi, E., Panuju, DR., dan Saefulhakim, S. 2003. Analisis Kecenderungan dan Dampak Proses Suburbanisasi di Wilayah Jabotabek: Suatu Upaya Pengembangan Model Pembangunan Wilayah Metropolitan. Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi X/2003. Institut Pertanian Bogor.